

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi dalam proses penyidikan serta untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dan memberikan solusi dalam mengatasi tindak pidana pornografi menurut Undang-Undang No 44 Tahun 2008, dan juga untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pornografi di Pengadilan Negeri Jepara dengan Nomor perkara 138/Pid.B/2018/PN.Jpa, dan untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana pornografi berdasarkan Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jepara. Untuk mencapai tujuan dari penelitian tersebut peneliti menggunakan metode pengumpulan data: metode wawancara, metode kepustakaan, dan metode analisis data yang berhubungan dengan pembahasan yang dikaji.

Hasil penelitian, Proses penegakan hukum terhadap pelaku Tidak Pidana Pornografi di Pengadilan Negeri Jepara telah dilakukan sesuai dengan ketentuan ketentuan yang berlaku. Penegakan hukum saat persidangan dilakukan oleh Hakim. Dalam pendekatan Sistem Peradilan Pidana, proses penegakan hukum yang dilakukan antara ketiga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan) tersebut berkaitan satu sama lain sehingga ketika salah satu penegak hukum keliru dalam penegakan hukumnya, akan berpengaruh pada penegak hukum yang lainnya. Dalam proses penegakan hukum, di dalamnya juga terdapat upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap suatu tindak pidana tertentu. Upaya penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma – norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dan hubungan – hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Upaya penegakan hukum dimulai dari proses penyidikan hingga sampai proses peradilan di pengadilan. Upaya penegakan hukum merupakan bagian yang terpisahkan dari upaya penanggulangan kejahatan yang memberikan dampak perlindungan bagi masyarakat. Langkah legislative yang ditempuh untuk melindungi korban dari pornografi yaitu Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pemberantasan tindak pidana pornografi. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 138/Pid.B/2018/PN Jpa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pertimbangan hakim dalam kasus yang Penulis teliti telah mempertimbangkan penjatuhan pidana berdasarkan aspek yuridis, sosiologis maupun filosofis. Majelis Hakim menerapkan ketentuan Pasal 36 jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia No 44 Tahun 2008 tentang pornografi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur-unsur pasalnya dan dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sementara untuk aspek filosofis dan sosiologisnya, yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah karena perbuatan terdakwa telah melanggar norma kesusilaan yang ada di masyarakat. Sehingga penjatuhan pidana sangat tepat untuk dijatuhkan kepada terdakwa agar adanya rasa keadilan ditengah masyarakat.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pornografi, Tindak Pidana

ABSTRACT

This study aims to determine the form of law enforcement against pornography crime in the investigation process and to find out the constraints faced and provide solutions in overcoming the crime of pornography according to Law No. 44 of 2008, and also to find out the Judge's consideration in deciding cases pornography crimes in the Jepara District Court with case number 138 / Pid.B / 2018 / PN.Jpa, and to find out the law enforcement of pornographic crimes based on Law No. 44 of 2008 concerning pornography. This research was conducted at the Jepara District Court. To achieve the objectives of the study researchers used data collection methods: interview methods, library methods, and data analysis methods related to the discussion under study.

The results of the study, the process of law enforcement against Pornography Criminal Offenders in the Jepara District Court has been carried out in accordance with the provisions of the applicable provisions. Law enforcement when the trial is carried out by the Judge. In the Criminal Justice System approach, the law enforcement process carried out between the three law enforcers (Police, Prosecutors and Courts) is related to each other so that when one law enforcer is wrong in enforcing the law, it will affect the other law enforcers. In the process of law enforcement, there are also law enforcement efforts carried out against a particular crime. Law enforcement efforts are the process of carrying out efforts to uphold or function legal norms in a tangible manner as a guideline for actors and legal relationships in public and state life. Law enforcement efforts start from the investigation process up to the judicial process in court. Law enforcement efforts are an integral part of crime prevention efforts that have an impact on protection for the community. The legislative step is taken to protect victims from pornography, namely Law Number 44 of 2008 concerning the eradication of criminal acts of pornography. Judge's consideration in making decisions in cases Number 138 / Pid.B / 2018 / PN Jpa is in accordance with applicable legal provisions. Judge's consideration in the case The meticulous author has considered criminal prosecution based on juridical, sociological and philosophical aspects. The Panel of Judges applies the provisions of Article 36 in conjunction with Article 10 of the Republic of Indonesia Law No. 44 of 2008 concerning pornography in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1st Criminal Code, because based on the facts revealed in the defendant's trial it has been proven to fulfill all the elements of the article and in the trial there were no cases that could eliminate the criminal, both justification reasons and forgiving reasons, while for the philosophical and sociological aspects, the Judge's consideration was because the defendant's actions violated the moral norms in the community. So that the imposition of criminal sanctions is appropriate for the defendant so that there is a sense of justice in the community.

Keywords: Law Enforcement, Criminal act, Pornography